

Implementasi Komunikasi Publik Dinas DP3AP2KB Kota Surakarta Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur

*Implementation of Public Communication by the Surakarta City DP3AP2KB Office in
the Prevention of Violence Against Minors*

Tesa Pajar Nugraha, Sihabuddin

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet
Riyadi Surakarta

nugrahasaa@gmail.com

Abstrak

Fenomena kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan di Kota Surakarta sehingga diperlukan implementasi komunikasi publik yang tepat dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi komunikasi publik Dinas DP3AP2KB Kota Surakarta dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Teori yang digunakan adalah komunikasi publik Hafied Cangara yang meliputi penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pejabat Dinas, konselor Puspaga, koordinator PPT, serta masyarakat penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi komunikasi publik DP3AP2KB bersifat edukatif, persuasif, dan partisipatif dengan penerapan melalui sosialisasi, penyuluhan, forum anak, konseling, dan layanan pendampingan keluarga, baik secara tatap muka, media sosial, maupun pendekatan jemput bola. Implementasi ini cukup efektif meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perubahan perilaku orang tua dalam menerapkan pola asuh tanpa kekerasan, meskipun masih dihadapkan pada hambatan keterbatasan anggaran, SDM, serta partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Komunikasi Publik, DP3AP2KB, Pencegahan Kekerasan Anak

Abstract

The phenomenon of violence against children remains a serious issue in Surakarta, requiring appropriate implementation of public communication by the local government. This study aims to describe and analyze the implementation of public communication by the DP3AP2KB Surakarta City in preventing violence against minors. The theory applied refers to Hafied Cangara's public communication model, which includes research, planning, implementation, evaluation, and reporting stages. This research employed a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants consisted of DP3AP2KB officials, Puspaga counselors, PPT coordinators, and community members as program recipients. The findings reveal that the implementation of public communication by DP3AP2KB is educational, persuasive, and participatory, carried out through socialization, counseling, the children's forum, and family assistance services, using face-to-face methods, social media, and proactive

outreach. This implementation has proven effective in increasing public understanding, awareness, and behavioral changes among parents in applying positive, non-violent parenting, although challenges remain, such as limited budget, human resources, and uneven public participation.

Keywords: *Implementation, Public Communication, DP3AP2KB, Child Violence Prevention*

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan terhadap anak kini menjadi isu penting yang mendapat perhatian luas di berbagai belahan dunia. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar serta memiliki keberagaman sosial dan budaya, tidak terlepas dari persoalan tersebut. Salah satu wilayah yang juga menghadapi tantangan serupa adalah Kota Surakarta atau yang akrab dikenal dengan sebutan Solo. Kota ini memiliki penduduk lebih dari 500 ribu jiwa (BPS Kota Surakarta, 2025) dengan tingkat kepadatan yang tinggi, sehingga berkembang menjadi pusat aktivitas kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi yang cukup menonjol di Jawa Tengah. Akan tetapi, di balik kemajuan yang tampak, masih terdapat problematika sosial yang tidak bisa diabaikan. Salah satu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan ialah terjadinya kekerasan terhadap anak di bawah umur yang masih kerap ditemukan di tengah masyarakat (Ananda & Yuliani, 2022).

Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan serta kesempatan untuk tumbuh kembang secara sehat, baik fisik maupun mental (Utami, 2018). Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak

masih sering menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan yang dialami pun beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Dampaknya tidak hanya menimbulkan penderitaan sesaat, tetapi juga dapat mengakibatkan trauma, gangguan perkembangan, bahkan risiko anak mengulang pola kekerasan di kemudian hari (Endrayani *et al.*, 2024).

Berdasarkan data laporan mengenai penanganan kasus kekerasan dari UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta, pada tahun 2023 tercatat ada 100 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta. Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan 29 aduan yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Di urutan kedua, terdapat kasus kekerasan seksual dengan 26 laporan, dan di posisi ketiga adalah kasus terkait pengasuhan anak sebanyak 22 laporan. Selain itu, juga ditemukan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 6 kasus, perundungan atau *bullying* 4 kasus, penganiayaan 3 kasus, dan perdagangan anak (*trafficking*) 1 kasus.

Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan menjadi 101 kasus. Pola kekerasannya pun berubah. Tahun ini, kekerasan seksual menjadi jenis yang paling banyak dilaporkan, yaitu sebanyak 27 kasus. Di posisi kedua terdapat KDRT dengan 22 laporan, disusul oleh kekerasan di lingkungan sekolah sebanyak 20 laporan. Selain itu, tercatat 13 kasus ABH, 12 kasus yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak, 5 kasus penganiayaan, dan 2 kasus perdagangan anak (DP3AP2KB, 2024).

Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak, tentunya menjadikan fenomena ini sebagai masalah yang harus segera diatasi. Mengingat sejak tahun 2017 hingga 2023 Surakarta secara konsisten memperoleh penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama. Akan tetapi, pada tahun 2024 kategori tersebut turun menjadi kategori Nindya. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara capaian penghargaan dengan realitas yang terjadi di lapangan, khususnya terkait meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak.

Secara ideal, predikat KLA menandakan bahwa suatu daerah telah memenuhi indikator yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Indikator tersebut dikelompokkan menjadi enam bagian, mulai dari penguatan kelembagaan,

dan lima klaster hak anak yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya, serta klaster perlindungan khusus.

Untuk menekan angka kekerasan, Dinas DP3AP2KB Kota Surakarta telah menjalankan berbagai program, seperti sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan di sekolah maupun masyarakat, pendampingan korban melalui UPTD PPA, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan, kepolisian, dan organisasi masyarakat. Dalam konteks inilah peran komunikasi publik menjadi sangat penting. Komunikasi publik tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran, memengaruhi sikap, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak (Ramadani, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya kesenjangan antara upaya pencegahan melalui komunikasi publik dengan hasil nyata yang diperoleh di lapangan. Di satu sisi, DP3AP2KB telah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan pendampingan. Namun di sisi lain, angka kekerasan anak masih cukup tinggi bahkan meningkat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana implementasi

komunikasi publik DP3AP2KB Kota Surakarta dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat DP3AP2KB, konselor Puspaga, koordinator PPT, dan masyarakat penerima program. Data sekunder berasal dari laporan kegiatan, dokumen resmi, serta literatur pendukung. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Komunikasi Publik DP3AP2KB Kota Surakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas DP3AP2KB Kota Surakarta telah melaksanakan komunikasi publik dalam pencegahan kekerasan terhadap anak melalui lima tahapan menurut Hafied Cangara, yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

- 1. Penelitian** dilakukan dengan memetakan kasus kekerasan anak melalui laporan UPTD PPA, aduan masyarakat, serta koordinasi dengan pihak sekolah dan kepolisian. Data tahun 2023 mencatat 100 kasus, dan meningkat menjadi 101 kasus pada 2024, dengan dominasi kekerasan seksual dan KDRT (DP3AP2KB, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan anak masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani dengan pendekatan komunikasi publik.
- 2. Perencanaan** program komunikasi publik disusun berdasarkan hasil pemetaan kasus. Strategi yang dirancang antara lain sosialisasi ke sekolah dan masyarakat, penyuluhan pola asuh positif, pembentukan Forum Anak, kampanye melalui media sosial, serta layanan konseling keluarga melalui PUSPAGA. Perencanaan ini sesuai dengan pendapat Ramadani (2019) bahwa komunikasi publik harus dirancang untuk meningkatkan kesadaran sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat.
- 3. Pelaksanaan** dilakukan dengan pendekatan berlapis, mencakup:
 - a. Tatap muka, berupa sosialisasi, seminar, dan diskusi komunitas.
 - b. Media digital, melalui publikasi konten edukatif di

media sosial resmi DP3AP2KB.

- c. Forum Anak, wadah partisipasi anak untuk menyampaikan aspirasi perlindungan hak mereka.
- d. Konseling keluarga, melalui layanan PUSPAGA.
- e. Pendekatan jemput bola, yakni mendatangi langsung masyarakat di wilayah rawan kasus.

Bentuk komunikasi ini bersifat edukatif, persuasif, dan partisipatif sebagaimana ditegaskan Effendy (2009) bahwa komunikasi bertujuan memengaruhi sikap dan perilaku khalayak.

4. **Evaluasi** dilaksanakan melalui monitoring kegiatan, pengumpulan umpan balik dari masyarakat, serta pencatatan laporan kegiatan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui efektivitas sekaligus hambatan program.

5. **Pelaporan** disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar perencanaan program berikutnya.

B. Efektivitas Komunikasi Publik

Program komunikasi publik DP3AP2KB terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan terhadap anak. Sosialisasi di sekolah membantu guru dan

siswa lebih memahami isu perlindungan anak, forum anak memberi ruang bagi anak untuk berpartisipasi, dan layanan konseling keluarga membantu orang tua belajar pola asuh yang lebih positif.

Namun demikian, peningkatan pemahaman masyarakat belum berbanding lurus dengan penurunan angka kasus. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara knowledge dan behavior. Hal ini sejalan dengan temuan Mucharam (2022) bahwa komunikasi publik akan efektif apabila tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif untuk mengubah perilaku.

C. Hambatan Implementasi

Beberapa hambatan yang ditemui dalam implementasi komunikasi publik DP3AP2KB, yaitu:

1. **Keterbatasan anggaran**, yang membatasi skala dan frekuensi kegiatan sosialisasi.
2. **Kekurangan sumber daya manusia**, khususnya konselor dan fasilitator lapangan.
3. **Partisipasi masyarakat rendah**, karena sebagian masih menormalisasi kekerasan sebagai bentuk mendisiplinkan anak.

Hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi publik tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan kebijakan, sumber daya, serta perubahan budaya masyarakat.

Pembahasan

Implementasi komunikasi publik DP3AP2KB Kota Surakarta sudah sesuai dengan prinsip komunikasi publik yang bersifat edukatif, persuasif, dan partisipatif. Upaya ini mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola asuh tanpa kekerasan. Namun, fakta bahwa angka kasus tetap meningkat menandakan bahwa komunikasi publik yang dijalankan belum sepenuhnya efektif menekan perilaku kekerasan di masyarakat.

Temuan ini relevan dengan latar belakang bahwa Surakarta meskipun memperoleh penghargaan Kota Layak Anak, realitas di lapangan justru menunjukkan angka kekerasan yang tinggi. Artinya, komunikasi publik memang berperan penting sebagai langkah preventif, tetapi masih membutuhkan penguatan melalui kolaborasi lintas sektor (sekolah, kepolisian, organisasi masyarakat), optimalisasi media digital, dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan demikian, komunikasi publik DP3AP2KB baru berhasil pada tataran meningkatkan kesadaran, tetapi belum maksimal dalam mengubah perilaku. Agar lebih

efektif, strategi komunikasi publik perlu diarahkan pada pendekatan dua arah yang mendorong dialog, partisipasi, serta keberlanjutan program perlindungan anak.

KESIMPULAN

Implementasi komunikasi publik DP3AP2KB Kota Surakarta dalam pencegahan kekerasan anak dilakukan melalui penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Strategi yang dijalankan bersifat edukatif, persuasif, dan partisipatif, seperti sosialisasi, forum anak, kampanye media sosial, serta konseling keluarga.

Hasilnya, komunikasi publik cukup efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola asuh tanpa kekerasan, namun belum berdampak signifikan pada penurunan angka kasus. Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi dua arah, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan partisipatif agar pencegahan kekerasan anak lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, Z. Z. Z. H., & Yuliani, S. (2022). Peran Pemerintah Kota Surakarta dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Surakarta) . *Jurnal Mahasiswa
Wacana Publik, Volume 2*(Nomor
1).

TENGGERA BARAT . *Jurna HAM,
Volume 9.*

BPS Kota Surakarta. (2025). *Kota
Surakarta Dalam Angka 2025: Vol.
Volume 49* (BPS Kota Surakarta, Ed.).
BPS Kota Surakarta.

Effendy, O. U. (2009). *ILMU
KOMUNIKASI Teori dan Praktek*. PT
REMAJA ROSDAKARYA.

Endrayani, D., Harahap, N., &
Ritonga, E. Y. (2024). Analisis
Komunikasi Kebijakan Publik Pusat
Kajian dan Perlindungan Anak
dalam Pencegahan Tindak Kejahatan
pada Anak di Kota Medan. *Al Qalam:
Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan
Kemasyarakatan* , Vol. 18.

Mucharam, A. (2022).
MEMBANGUNKOMUNIKASI
PUBLIK YANG EFEKTIF. *Ikon --
Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 27,
76.

Ramadani, T. (2019).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN
KOMUNIKASI PUBLIK DI
KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL . *Jurnal
Borneo Administrator*, Vol. 15.

Utami, P. N. (2018). PENCEGAHAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK
DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS
RASA AMAN DI NUSA